

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI RIAU
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022 – 2023
23 - 25 NOVEMBER 2022

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik terkait evaluasi dan pengukuran HGU, HGB, HPL serta tanah terlantar ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi pengawasan. Pertemuan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Polda Provinsi Sumatera Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sebagaimana kita pahami bersama, konflik pertanahan sebagian besar dipicu oleh penguasaan tanah korporasi besar yang telah menelantarkan tanah HGU dan HPL. Namun demikian, manakala tanah terlantar tersebut diolah oleh masyarakat disekitar, maka pemegang hak tanah tersebut melakukan pengusiran atau upaya paksa lain. Sehingga munculah konflik horizontal antara pengusaha besar dengan rakyat kecil. Secara nasional tercatat kurang lebih 68 % tanah di Indonesia dikuasai 1% kelompok pengusaha, sementara lebih dari 16 Juta petani bergantung hidup dengan lahan di bawah setengah hektar saja. Sementara itu ada potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU melebihi batas izin, yang mencapai Rp 380 Triliun.

Terkait persoalan HGU di Provinsi Riau, ada beberapa kasus yang menyita perhatian publik. Seperti kasus HGU PT Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kuansing. Kasus tersebut dalam proses pengadilan dan penyidikan KPK. Demikian juga kasus HGU PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kini dalam proses pengadilan, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 104,1 Triliun.

Selain itu, menurut Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian luas lahan kelapa sawit di Riau terluas di Indonesia dengan luas 3,38 juta hektar. Namun, yang memiliki izin HGU hanya seluas 1,1 juta hektar. Jadi HGU lahan sawit di Riau, hanya sepertiga yang memiliki sertipikat HGU. Untuk itu perlu kiranya ada pengukuran ulang terhadap HGU-HGU yang telah dikeluarkan oleh BPN.

Titik tolak pengawasan Komisi II DPR RI terkait HGU adalah memperkuat peran negara dalam melakukan pengelolaan aset berupa lahan atau tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang hak menguasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dalam kaitan peran negara dalam mengelola aset berupa tanah berhubungan erat dengan keberadaan pemberian perizinan HGU yang kerap bermasalah misalnya tumpang tindih pemilikan izin, hingga lahan terlantar.

Komisi II DPR RI juga berharap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang di revisi oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama Kanwil BPN Provinsi Riau segera selesai. Selain itu Komisi II DPR RI juga berharap agar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat ditingkatkan jumlahnya. Karena hingga saat ini, baru 6 (enam) RDTR yang telah menjadi PERDA dan baru 16 (enam belas)

RDTR dalam proses penyusunan. Jumlah tersebut tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kecamatan dan kawasan industri yang tersebar di Provinsi Riau.

Komisi II DPR RI mendorong agar RTRW dan RDTR yang telah/akan diterbitkan dapat memperhatikan konsepsi wawasan nusantara dan tata ruang nasional, yang hasil akhirnya adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup, serta menjamin keamanan bagi daerah yang memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga. Dan mampu meningkatkan kecintaan pada NKRI.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian serius, Komisi II DPR RI meminta agar pengelolaan tata ruang wilayah dan segala permasalahannya, memperhatikan dengan seksama UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga keberadaan regulasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau berjumlah 12 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH /fraksi PDIP beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F- PDI.P
2.	A-240	Drs. Cornelis, M.H	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-146	M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-248	Hj. Aida Muslimah	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/ F-PG
6.	A-282	Drs. H. Riswan Tony DK	Anggota/ F-PG
7.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F- P.Gerindra
8.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc	Anggota/ F- P.Gerindra
9.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota/ F-PD
10.	A-525	Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M	Anggota/ F-PD
11.	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt	Anggota/ F-PKS
12.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/ F-PAN
13.	-----	Zulfiqor	Sekretariat Komisi II
14.	-----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi

			II
15.	-----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
16.	-----	Eko Supriyanto	Protokol Set. Komisi II
17.	-----	Anggia Michel	Tenaga Ahli Komisi II
18.	-----	Alim Bathoro	Tenaga Ahli Komisi II
19.	-----	Slamet Sanjaya	TVR Parlemen
20.	-----	Friedrick Munchen	Media Sosial

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari pemberitaan DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 23-25 November 2022. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kanwil BPN Provinsi Riau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

a. Pemaparan PLT Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau

Luas Provinsi Riau (daratan) adalah ± 9.179.183,52 Ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan seluas ± 5.328.819,88 Ha (58,04%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 3.748.323,40 Ha (41,31%). Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Estimasi jumlah bidang tanah yang ada di Provinsi Riau mencapai ± 3.583.939 bidang, dengan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar adalah ± 2.337.400 bidang (65,22%) dan jumlah bidang yang belum terdaftar ± 1.246.539 bidang (34,78%). Dengan target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Provinsi Riau telah terdaftar, maka setiap tahun dari tahun 2023 target pendaftaran tanah di Provinsi Riau adalah ± 415.513 bidang tanah.

Terkait dengan Tata Ruang, Provinsi Riau telah memiliki RTRW Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038. Kemudian untuk 12 Kabupaten/Kota, sampai dengan saat ini sudah ada 8 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah, dan masih ada 4 kabupaten yang masih dalam proses penyusunan yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hilir.

Berkaitan dengan jumlah Hak Guna Usaha (HGU) baik yang dimiliki BUMN/BUMD maupun oleh swasta yang ada di Provinsi Riau sampai dengan saat ini yang masih aktif berjumlah 495 bidang dengan luas ± 1.001.809 Ha dengan rincian:

- BUMN sebanyak 66 Bidang dengan luas ±192.002 Ha.
- BUMD sebanyak 3 Bidang dengan luas ±1.594 Ha.
- Swasta sebanyak 416 Bidang dengan luas ±806.416 Ha.

Kemudian untuk HGU yang telah berakhir jangka waktunya sampai dengan saat ini di Provinsi Riau mencapai 51 bidang dan yang telah diperpanjang yaitu 49 bidang, artinya ada 2 HGU yang telah berakhir jangka waktunya namun sampai dengan saat ini belum diperpanjang atau diperbarui hak nya. Untuk HGU yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar ada 1 HGU, yaitu PT. Alfa Glory seluas 726,25 Ha yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10/PTT-HGU/BPNRI/2012 tanggal 18 Januari 2012, dan telah ditetapkan sebagai objek Redistribusi Tanah untuk tahap pertama seluas 219,18 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 157/SK-14.MP.02.03/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan selanjutnya untuk tahap kedua ditetapkan seluas 185,78 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 176/SK-14.MP.02.03/VIII /2020 tanggal 31 Agustus 2020. Terhadap sisa luas 321,29 ha masih terdapat masalah batas desa yang perlu diselesaikan: Bahwa pemilik tanah berada di luar letak tanah (absentee) dan banyaknya penguasaan masyarakat terhadap tanah pertanian yang melebihi batas maksimum (lebih dari 5 Ha).

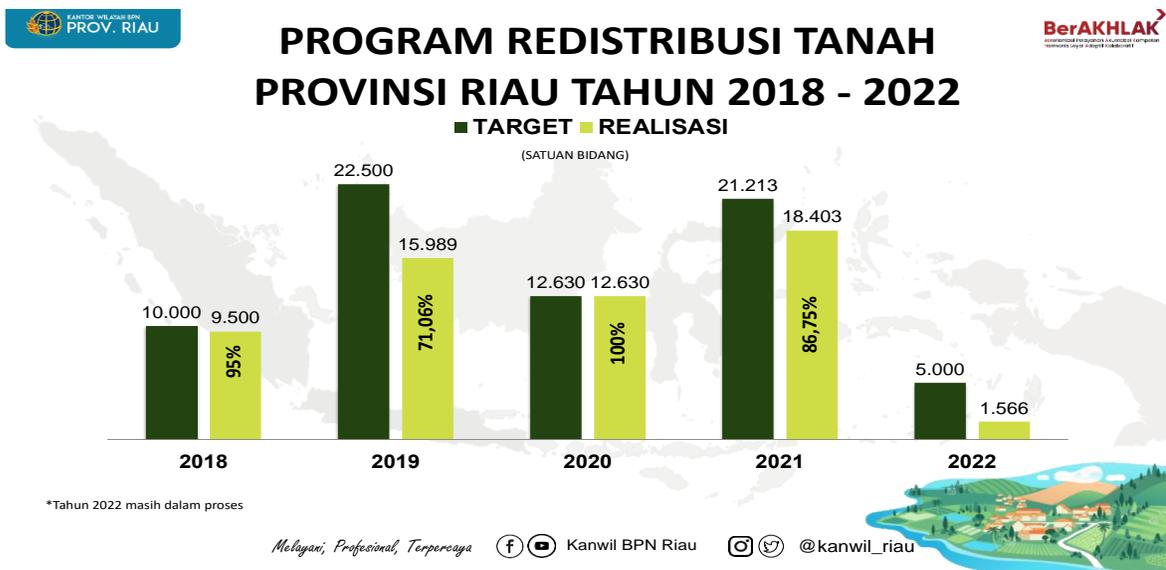


TARGET DAN REALISASI PTSL PROVINSI RIAU



PTSL (Semua Anggaran)		
Target PBT = 51.189 Bidang SHAT = 81.061 Bidang K4 = 4.124 Bidang	Realisasi PBT → 40.515 Bidang (79,14%) SHAT (Dashboard) → 32.853 Bidang (31,43%) K1 → 14.411 Bidang (17,75%) K3.1 → 81.441 Bidang (22,75%) K4 → 1,216 Bidang (29,48%)	
PTSL 2022 RM (Bidang)	PTSL 2022 PM ASN (Bidang)	PTSL 2022 PM Pihak ke-3 Target (Bidang)
Target PBT = 5.028 SHAT = 31,561 K4 = 470 Realisasi PBT = 4727 (94,01 %) SHAT = 26.427 (83,73%) K1 = 11.726 (37,15 %) K3.1 = 14.701 (47,19%) K4 = 607 (129,15%)	Target PBT = 9.000 SHAT = 0 K4 = 0 Realisasi PBT = 7.714 (85,71%)	Target PBT = 37.161 K4 = 2.839 SHAT = 49.500 Realisasi PBT = 30.378 (81,75%) SHAT (Dashboard) = 5.494 (11,10%) K1 = 2.685 (5,42%) K3.1 = 3.547 (7,17%) K2 = 1 (0%) K4 = 609 Bidang (21,45)

5. Melakukan Sosialisasi yang lebih intensif terhadap Masyarakat mengenai manfaat Sertipikat
6. Mempercepat penyelesaian Bidang yang termasuk Potensi K1 menjadi Sertipikat (K1);
7. Mempercepat penyelesaian Bidang kluster K3.1 menjadi Sertipikat (K1);
8. Mempercepat penyelesaian bidang tanah yang sudah di entri (Pemberkasan) menjadi Sertipikat (K1);



Rekapitulasi Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022

Data Dashboard Redistribusi Tanah per 21 November 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Target Fisik (Bidang)	Penyuluhan	Inventarisasi dan Identifikasi	Survey	Pemetaan	Sidang PPL	Penetapan Obyek dan Subyek	SK Redistribusi	Penerbitan Sertipikat	Persentase Capaian Kumulatif (%)	Keterangan
1	Siak	1,100	1,100	1,100	1,117	1,115	1,100	649	649	649	84,99%	Sidang PPL telah dilaksanakan 1100 bidang (100%). Penerbitan sertipikat ditargetkan akan terlaksana 100% pada akhir bulan November.
2	Kuantan Singingi	800	800	791	776	735	400	400	400	400	73,47%	Sidang PPL untuk sisa target akan dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan November 2022. Penerbitan sertipika ditargetkan akan terlaksana 100% pada bulan Desember.
3	Pelalawan	1,100	1,100	1,100	1,045	1,045	517	517	517	517	72,25%	Sidang PPL telah dilaksanakan 1100 bidang (100%). Penerbitan sertipika ditargetkan akan terlaksana 100% pada minggu I bulan Desember.
4	Rokan Hulu	1,650	1,650	1,639	1,650	1,646	0	0	0	0	49,89%	Sidang PPL telah dilaksanakan 1.650 bidang (100%). Penerbitan sertipikat ditargetkan akan terlaksana 100% pada bulan Desember.
5	Rokan Hilir	350	350	340	340	340	0	0	0	0	48,93%	Sidang PPL telah dilaksanakan 350 bidang (100%). Penerbitan sertipikat ditargetkan akan terlaksana 100% pada akhir bulan November.
Jumlah		5,000	5,000	4,970	4,928	4,881	2,017	1,566	1,566	1,566	66,24%	
Presentase Per Tahapan (%)			100,00%	99,40%	98,56%	97,62%	40,34%	31,32%	31,32%	31,32%		
Presentase Kumulatif (%)											66,24%	

@atr_bpn | @KementerianATRBP | @kementerian.atrbpn | KementerianATRBP | Melayani, Profesional, Terpercaya

Dinas yang membidangi Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu baru menyetujui Obyek Redistribusi Tanah yang berasal dari Tanah Transmigrasi pada awal November 2022, sehingga Sidang PPL baru dapat dilaksanakan pada pertengahan bulan November 2022. Obyek Redistribusi Tanah yang berasal dari Plasma HGU (Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat) yang semula ditargetkan + 600 bidang, tetapi yang dapat disertipikatkan hanya 300 bidang disebabkan oleh penguasaan tanah oleh subjek hak yang melebihi batas maksimum dan terkena ketentuan absentee.

**Data Pemberian, Perpanjangan, dan Pembaharuan HGU yang
terkena kewajiban 20% Fasilitas Pembangunan Kebun
Masyarakat Sekitar (Plasma) Provinsi Riau**

No	KANTOR PERTANAHAN	JUMLAH HGU KESELURUHAN	HGU YG DITERBITKAN SETELAH 2014 (ADANYA KEWAJIBAN PLASMA 20%)				
			PEMBERIAN HGU	PERPANJANGAN/PEMBARUAN HGU	JUMLAH HGU	LUAS HGU (Ha)	LUAS KEWAJIBAN PLASMA (Ha)
1	Kota Pekanbaru	5	-	1	1	3.359,9197	243,88
2	Kabupaten Bengkalis	38	-	1	1	11.571,17	2.416,82
3	Kabupaten Indragiri Hulu	89	39	7	46	10.173,53	1.429,41
4	Kabupaten Indragiri Hilir	36	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Kampar	81	5	-	5	4.099,86	778,6
6	Kota Dumai	2	-	1	1	18,71	-
7	Kabupaten Rokan Hilir	58	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Rokan Hulu	41	10	4	14	33.837,38	9.303,08
9	Kabupaten Siak	34	8	1	9	1.921,7971	513,8
10	Kabupaten Kuantan Singingi	26	-	6	6	7.717,7713	4.874
11	Kabupaten Pelalawan	85	17	-	17	8.155,32	2.796,13
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	0	-	-	-	-	-
TOTAL		495	79	19	98	78.982,47	22.413,93

Melayani, Profesional, Terpercaya



Kanwil BPN Riau



@kanwil_riau



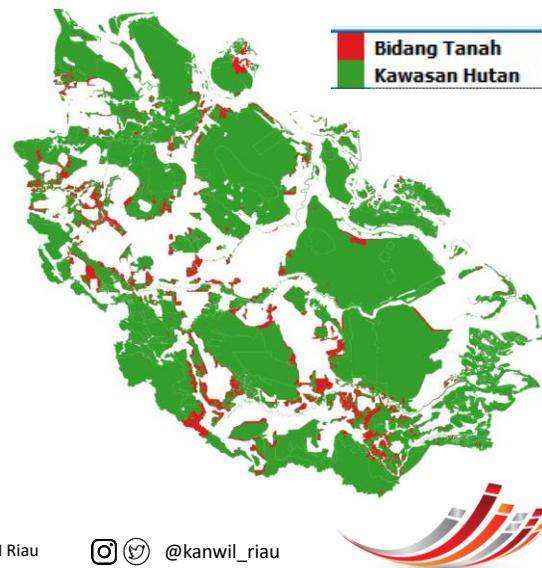
BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI MASUK KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU



- Peta Kawasan hutan yang digunakan berasal dari SK Kementerian KLHK Nomor 903/2016;
- Data bidang tanah di unduh dari KKP Data Bidang Tanah di pilih yang tahun penerbitan sebelum SK Kawasan Hutan Tahun 2016.

NO	TIPE HAK	JUMLAH BIDANG	LUAS (Ha)
1	Hak Guna Bangunan	1.669	1.254,78
2	Hak Guna Usaha	157	69.386,49
3	Hak Milik	76.235	71.271,50
4	Hak Pakai	358	641,19
5	Hak Pengelolaan	4	9,56
6	Hak Wakaf	32	5,31
Total		78.455	142.568,8

*Sumber: Pusdatin Kementerian ATR/BPN



Melayani, Profesional, Terpercaya



Kanwil BPN Riau



@kanwil_riau



SEBARAN HAK DI DALAM KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU



No	Kabupaten/ Kota	Hak Milik		Hak Guna Bangunan		Hak Guna Usaha		Hak Pakai		Hak Wakaf		Hak Pengelolaan		Total	
		Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)
1	Bengkalis	2.830	1.997,32	42	313,69	15	1.378,51	222	179,78					3.109	3.869,30
2	Indragiri Hilir	4.183	4.871,14	23	79,57	7	2.713,76	7	5,42					4.220	7.669,89
3	Indragiri Hulu	8.186	14.540,41	60	115,05	20	29.539,30	5	110,27	5	1,12	2	0,18	8.278	44.306,33
4	Kampar	15.394	9.286,46	933	240,43	34	9.094,72	4	110,93					16.365	18.732,54
5	Kepulauan Meranti	587	549,59	7	1,72			1	0,34	2	1,80			597	553,45
6	Kuantan Singingi	14.350	8.651,69	79	92,15	17	9.881,74	14	79,98					14.460	18.705,56
7	Pelalawan	8.583	11.773,17	3	0,94	22	5.404,98	63	90,73					8.671	17.269,82
8	Rokan Hilir	4.340	3.383,97	70	79,49	13	4.007,47	6	17,74	2	1,08			4.431	7.489,75
9	Rokan Hulu	9.981	10.288,94	14	55,53	20	4.632,99	18	5,95	15	0,96			10.048	14.984,37
10	Siak	2.454	2.820,00	9	55,71	8	2.730,5	2	1,11	1	0,15	2	9,38	2.476	5.616,85
11	Dumai	5.208	2.924,58	422	174,74			15	19,30	7	0,20			5.652	3.118,82
12	Pekanbaru	138	184,23	7	45,76	1	2,52	1	19,64					147	252,15
Grand Total		76.234	71.271,50	1.669	1.254,78	157	69.386,49	358	641,19	32	5,31	4	9,56	78.454	142.568,83

Melayani, Profesional, Terpercaya



Kanwil BPN Riau



@kanwil_riau

No	Satker	Sumber Dana									JUMLAH		
		PHLN			RM			PNBP					
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Kantah Kab. Kepulauan Meranti	448.830.000	181.830.000	40,51%	3.587.866.000	3.027.344.785	84,38%	1.508.678.000	1.152.341.163	76,38%	5.545.374.000	4.361.515.948	78,65%
2	Kantah Kota Dumai	314.080.000	58.000.000	18,47%	4.630.445.000	3.781.060.479	81,66%	1.291.027.000	826.334.948	64,01%	6.235.552.000	4.665.395.427	74,82%
3	Kantah Kab. Bengkalis	897.872.000	242.480.752	27,01%	5.356.314.000	4.339.265.199	81,01%	1.654.693.000	1.218.608.223	73,65%	7.908.879.000	5.800.354.174	73,34%
4	Kantah Kab. Pelalawan	1.092.602.000	424.368.000	38,84%	6.098.108.000	4.861.372.238	79,72%	2.064.207.000	1.344.293.539	65,12%	9.254.917.000	6.630.033.777	71,64%
5	Kantah Kab. Rokan Hulu	967.405.000	114.840.000	11,87%	7.221.334.000	5.756.388.835	79,71%	1.614.461.000	1.075.926.505	66,64%	9.803.200.000	6.947.155.340	70,87%
6	Kantah Kota Pekanbaru	1.791.872.000	424.574.400	23,69%	8.535.622.000	6.702.204.858	78,52%	3.314.727.000	2.351.406.524	70,94%	13.642.221.000	9.478.185.782	69,48%
7	Kantah Kab. Kuantan Singingi	935.516.000	-	0,00%	4.851.931.000	4.108.364.669	84,67%	1.670.021.000	988.070.753	59,17%	7.457.468.000	5.096.435.422	68,34%
8	Kantah Kab. Kampar	6.374.459.000	3.258.846.995	51,12%	7.366.400.000	6.220.307.544	84,44%	4.850.724.000	2.861.786.041	59,00%	18.591.583.000	12.340.940.580	66,38%
9	Kantah Kab. Rokan Hilir	812.291.000	97.821.000	12,04%	6.429.311.000	4.557.726.255	70,89%	1.376.210.000	754.833.688	54,85%	8.617.812.000	5.410.380.943	62,78%
10	Kanwil BPN Prov. Riau	14.633.716.000	1.791.685.660	12,24%	35.863.993.000	27.625.113.966	77,03%	6.895.077.000	4.408.701.273	63,94%	57.392.786.000	33.825.500.899	58,94%
11	Kantah Kab. Siak	3.525.431.000	591.798.167	16,79%	6.168.795.000	5.140.031.057	83,32%	3.081.527.000	1.426.027.680	46,28%	12.775.753.000	7.157.856.904	56,03%
12	Kantah Kab. Indragiri Hulu	4.792.191.000	900.217.950	18,79%	6.804.503.000	4.991.197.834	73,35%	2.718.558.000	1.369.314.960	50,37%	14.315.252.000	7.260.730.744	50,72%
13	Kantah Kab. Indragiri Hilir	3.079.599.000	493.734.955	16,03%	4.293.238.000	3.490.792.858	81,31%	2.526.700.000	1.011.687.581	40,04%	9.899.537.000	4.996.215.394	50,47%
TOTAL		39.665.864.000	8.580.197.879	21,63%	107.207.860.000	84.601.170.577	78,91%	34.566.610.000	20.789.332.878	60,14%	181.440.334.000	113.970.701.334	62,81%

Melayani, Profesional, Terpercaya

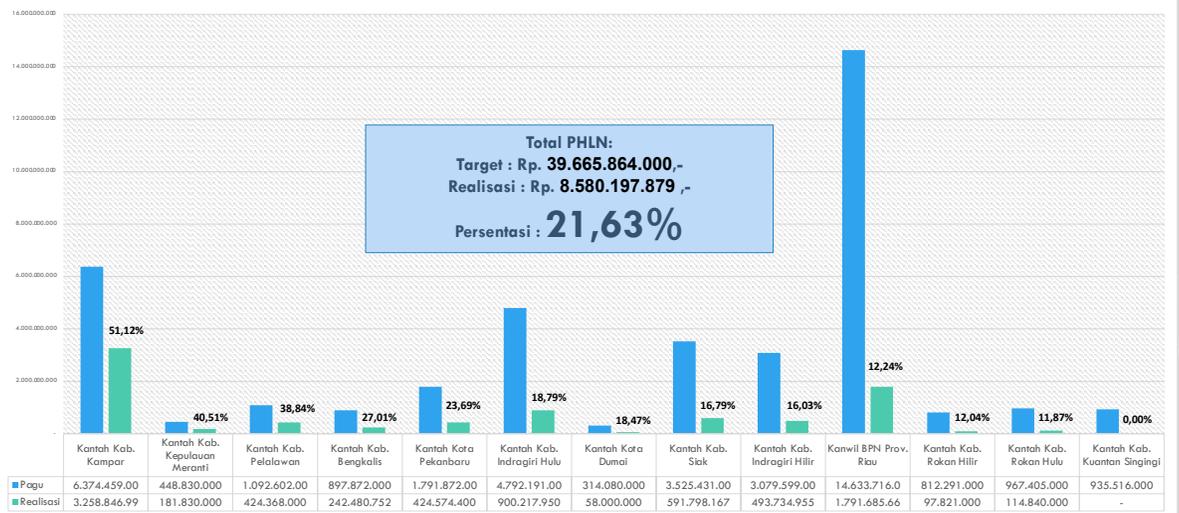


Kanwil BPN Riau



@kanwil_riau

PHLN
PINJAMAN LUAR NEGERI



Melayani, Profesional, Terpercaya



Kanwil BPN Riau



@kanwil_riau

RM
RUPIAH MURNI



Melayani, Profesional, Terpercaya

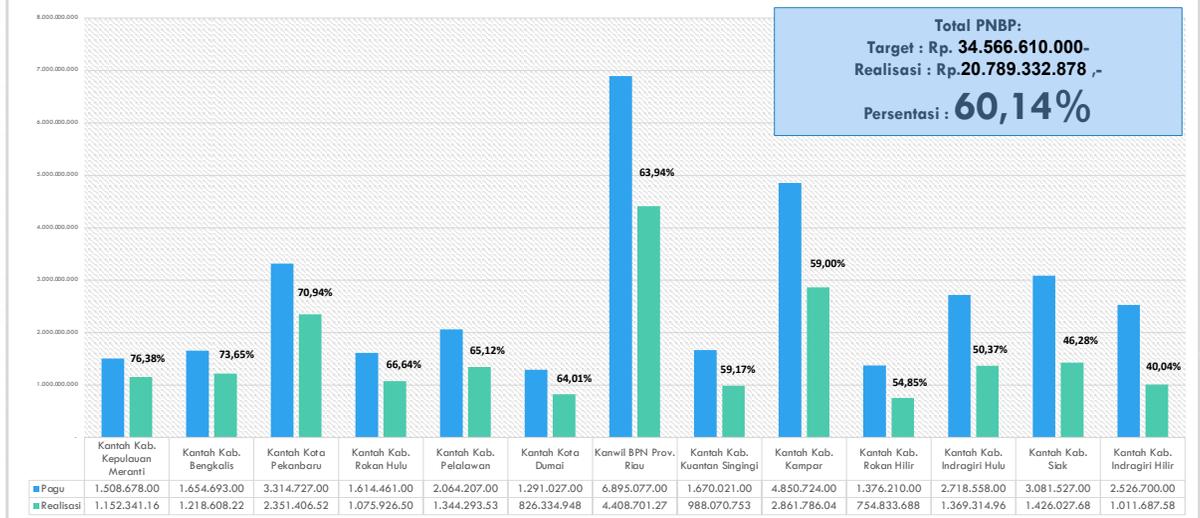


Kanwil BPN Riau



@kanwil_riau

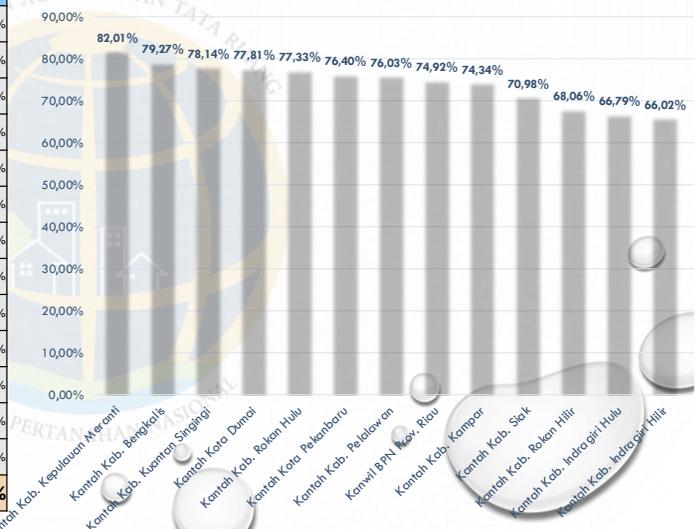
PNBP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Melayani, Profesional, Terpercaya (f) (y) Kanwil BPN Riau (i) (t) @kanwil_riau

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN NON PHLN

No	Satker	Pagu Non PHLN	Realisasi Non PHLN	%
1	Kantah Kab. Kepulauan Meranti	5.096.544.000	4.179.685.948	82,01%
2	Kantah Kab. Bengkalis	7.011.007.000	5.557.873.422	79,27%
3	Kantah Kab. Kuantan Singingi	6.521.952.000	5.096.435.422	78,14%
4	Kantah Kota Dumai	5.921.472.000	4.607.395.427	77,81%
5	Kantah Kab. Rokan Hulu	8.835.795.000	6.832.315.340	77,33%
6	Kantah Kota Pekanbaru	11.850.349.000	9.053.611.382	76,40%
7	Kantah Kab. Pelalawan	8.162.315.000	6.205.665.777	76,03%
8	Kanwil BPN Prov. Riau	42.759.070.000	32.033.815.239	74,92%
9	Kantah Kab. Kampar	12.217.124.000	9.082.093.585	74,34%
10	Kantah Kab. Siak	9.250.322.000	6.566.058.737	70,98%
11	Kantah Kab. Rokan Hilir	7.805.521.000	5.312.559.943	68,06%
12	Kantah Kab. Indragiri Hulu	9.523.061.000	6.360.512.794	66,79%
13	Kantah Kab. Indragiri Hilir	6.819.938.000	4.502.480.439	66,02%
TOTAL		141.774.470.000	105.390.503.455	74,34%



Melayani, Profesional, Terpercaya (f) (y) Kanwil BPN Riau (i) (t) @kanwil_riau

Kendala dan hambatan yang dihadapi terkait sumber dana PLN antara lain:

1. Kegiatan Digitalisasi dan Validasi, Penandatanganan Kontraknya baru di awal Bulan Oktober dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 8.837.699.232,-;
2. Adanya Penambahan Pagu anggaran untuk Kegiatan Pembayaran Sisa Kontrak PTSL PM Fase IV dari Sumber dana PLN di awal Bulan Oktober sebesar Rp.14.571.001.000;
3. Penandatanganan Kontrak Pengukuran Pihak Ketiga (PTSL PM di 4 Kabupaten) baru dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 dengan Nilai Rp. 12.667.716.000,- dengan realisasi Rp. 1.753.762.672,- (13,85%) dan sisa anggaran dalam proses pengerjaan sebesar Rp. 10.231.953.328,- (86,15%);
4. Penambahan Belanja Modal Pembangunan Gedung Arsip sebanyak 4 Kabupaten sebesar Rp. 1.243.334.000,- yang baru diterima pada Awal Bulan Oktober dan dalam proses persiapan Kontrak;
5. Adanya Blokir Anggaran/Automatic Adjustment (AA) Senilai Rp. 2.083.646.000,-;

6. Untuk Kegiatan Layanan masih dalam proses Revisi DJA untuk Optimalisasi ke Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran **Rp. 2.493.654.000,-** dan pengurangan Pagu Belanja Pegawai sebesar **Rp. 1.973.915.000,-**.

b. Pemaparan Gubernur Provinsi Riau

Terdapat lahan perkebunan yang sudah memiliki HGU, tetapi berdasarkan SK.903 Tahun 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menjadi kawasan hutan. Dari 224 perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) yang memiliki HGU baru 140 Perusahaan (62.5%), sedangkan 84 perusahaan belum memiliki HGU. Belum dimilikinya HGU karena Rata-rata perusahaan tersebut belum memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan. Masalah ini harus segera dituntaskan karena sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Belum dilaksanakan sanksi yang tegas terhadap Perusahaan yang belum memiliki HGU. Sesuai pasal 59 Permentan No. 98 Tahun 2013 bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP sebelum peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

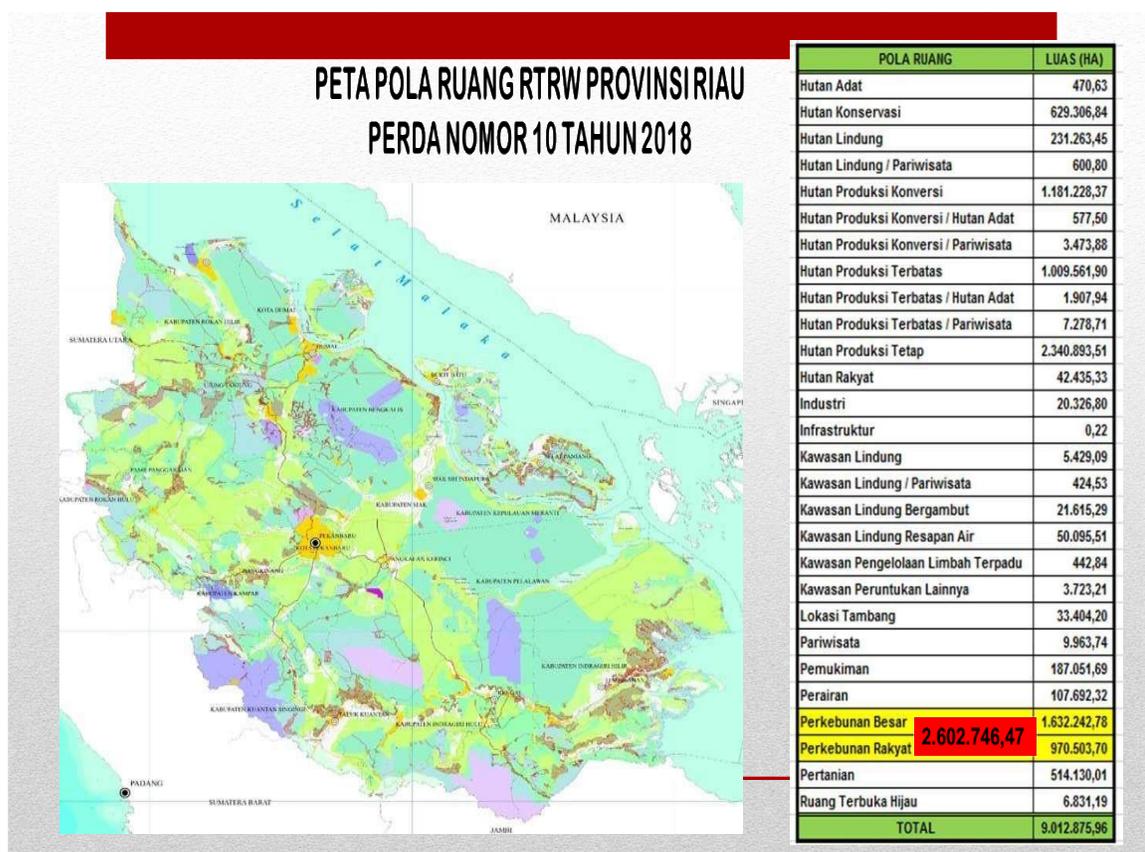
Masyarakat lebih banyak melaporkan pengaduan tentang sengketa/konflik pertanahan ke Pemerintah Provinsi Riau dibandingkan ke Kanwil BPN Provinsi Riau. Berdasarkan pengaduan masyarakat terdapat banyak perusahaan yang menguasai lahan lebih dari luas lahan yang memiliki HGU. Konflik seperti ini terjadi di Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Contoh kasus HGU milik PT Trisetia Usaha Mandiri (PT. TUM) yang izin perusahaannya Sebagian masih berada di lahan gambut yang memiliki fungsi lindung. Di lahan tersebut rawan terjadi kebakaran sementara masyarakat masih banyak yang menanam padi. Terdapat 28 perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat. Permasalahan konflik lahan perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat yaitu:

1. Adanya klaim msyarakat bahwa lahan perkebunan perusahaan adalah lahan ninik mamak masyarakat, sedangkan secara de yure perusahaan memiliki pelepasan kawasan hutan dan Izin Usaha Perkebunan sudah HGU atas lahan tersebut.
2. Masyarakat menuntut realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, sedangkan perusahaan perkebunan yang telah memiliki plasma dengan kerjasama pola PIR-BUN, PIR-KKPA, dan telah memiliki batas minimal 20% tidak terkena kewajiban lagi.
3. Perusahaan yang belum memiliki plasma wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari areal IUP atau IUP-B nya dan dibangun diluar IUP atau IUP- B nya.
4. Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sesuai Pasal 15 pada Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah mempertimbangkan ketersediaan lahan. Dalam hal keterbatasan lahan melalui Permentan No. 18 Tahun 2021 telah diatur bentuk-bentuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai Pasal 7 yaitu:
 - a. Subsistem hulu
 - b. Subsistem kegiatan budi daya
 - c. Subsistem hilir
 - d. Subsistem penunjang
 - e. Fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar
 - f. Bentuk kegiatan lainnya

Ada baiknya dilakukan pengukuran ulang HGU, konflik terjadi karena tidak adanya plasma yang dibangun oleh pengusaha. Harusnya ada 20% untuk plasma. Kebanyakan perusahaan harus mencari tanah lagi, plasma bukan dibangun dari

tanah HGU perusahaan. Sementara sulit mencari tanah lagi di Provinsi Riau karena Sebagian besar merupakan lahan gambut.

Saat ini Pemerintah Provinsi Riau sedang melakukan revisi terhadap RTRW Provinsi Riau. Peraturan Daerah Provinsi Riau No 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau telah digugat di Mahkamah Agung sehingga pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan revisi yang salah satunya harus disesuaikan dengan zona wilayah pesisir. RTRW Provinsi yang baru juga harus diikuti oleh kabupaten/kota di Provinsi Riau.



PROGRES TOL TRANS SUMATERA DI PROVINSI RIAU UPDATE APRIL 2022 SEPANJANG 616 KM

No.	RUAS (PANJANG TRASE) NILAI INVESTASI	KEBUTUHAN TANAH	SK PENETAPAN LOKASI (PENLOK)	PROGRES		Keterangan
				Pengadaan Tanah	Konstruksi	
1.	Pekanbaru – Kandı – Dumai (131 KM)	1.172,58 Ha	Ditetapkan 4 Januari 2011 SK Gubernur No. Kpts.52/I/2011	100 %	100 %	Sudah diresmikan
2.	Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tol oleh Kementerian PUPR RI		Tahap Perencanaan
3.	Pekanbaru – Bangkinang (40 KM) Rp. 5,95 Trilyun	309,93 Ha	Ditetapkan 19 Desember 2019 SK Gubernur No. Kpts.1347/XII/2019	85,90 %	81,23 %	- Pada STA 9 +400 s/d 40 konstruksi 98,77% dan pengadaan lahan 98.84% - Pada STA 0 s/d 9 pembangunan nya dilaksanakan pada th 2022 (masih dalam proses mekanisme pelepasan kawasan hutan, - pada lokasi STA 0 sd STA 7 menunggu SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri LHK
4.	Bangkinang – Pangkalan Tahap I (24,7 KM) Rp. 7,31 Trilyun	225,57 Ha	Ditetapkan 25 Agustus 2020 SK Gubernur No. Kpts.1289/VIII/2020	21,43 %	57,10 % (pekerjaan konstruksi saat ini dilakukan dengan sistem penyewaan tanah)	Tahap Pelaksanaan
5.	Jambi-Rengat 81,850 KM (dalam Wilayah Provinsi Riau) Rp. 38,9 Trilyun	821,10 Ha	Ditetapkan 23 Oktober 2020 SK Gubernur No. Kpts.1448/X/2020	1,41 %	-	• Tahap Pelaksanaan • Total luasan trase tol yang terkena kawasan hutan +/- 91,9 % (terhadap luasan lahan Tol)
6.	Rengat-Pekanbaru (206,680KM) Rp. 36,025 Trilyun	2.459,39 Ha	Belum ditetapkan	BA Konsultasi Publik sudah disampaikan Tim Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Lahan kepada Kemen PUPR. Proses Penlok Trase Jalan Tol Rengat – Pekanbaru		Proses Penlok Trase Jalan Tol Rengat – Pekanbaru saat ini menunggu proses Pelepasan Kawasan Hutan dan Revisi DPPT akibat pergeseran trase
7.	Bangkinang – Pangkalan Tahap II	-	-	-	-	-
TOTAL		4.988 Ha				

RUAS	LUAS DALAM KAWASAN HUTAN	PERMASALAHAN
JAMBI – RENGAT 81,85 Km	736 HA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 12 desa (5 desa di Kab Inhil dan 7 Desa di Kab Inhu) berada dlm Kawasan Hutan yang dikonversi (HPK) seluas 575 Ha dan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 161 Ha, APL 96 Ha 2. Pada lokasi trase tol yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, PPK Lahan masih menunggu proses pelepasan kawasan untuk dapat diproses lebih lanjut pembayaran UGK sesuai prosedur. Saat ini roses pembebasan lahan berjalan hanya pada lokasi yang tidak terkena kawasan hutan atau APL (Area Penggunaan Lain) 3. Diperlukan revisi Penlok pada batas Prov. Riau dengan Prov. Jambi dikarenakan sebagian trase +/- 500 m masuk ke dalam batas Wil. Prov Jambi.
RENGAT - PEKANBARU 206,68 Km	800 HA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat lahan Kawasan Hutan yang dikonversi (HPK) seluas 482 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 318 Ha, APL 1.724 Ha 2. Terdapat pergeseran pada trase jalan tol di beberapa titik akibat bersinggungan dengan SUTET dan Fasilitas Helipad PT.TGI serta Fasilitas Pengolahan Limbah Produksi PT. Adei Plantatiom 3. Progress penyiapan BA ROW Plan sebagai dasar pembuatan DPPT Revisi untuk pergeseran trase Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Rengat masih dalam proses review pada Subdit Jalan Bebas Hambatan (JBH) Dirjen Bina Marga 4. BA Konsultasi Publik sudah disampaikan Tim Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Lahan kepada Kemen PUPR. Proses Penlok Trase Jalan Tol Rengat – Pekanbaru saat ini menunggu proses Pelepasan Kawasan Hutan dan Revisi DPPT akibat pergeseran trase.

PERMASALAHAN TOL TRANS SUMATERA DI WILAYAH PROPINSI RIAU

RUAS	LUAS DALAM KAWASAN HUTAN	PERMASALAHAN
PEKANBARU – BANGKINANG 40 Km	25 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 2 desa berada dlm Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 25 Ha, APL 293 Ha 2. Lokasi yang merupakan Hutan Kawasan Produksi berada pada STA 0 sd STA 7 diharapkan segera dilakukan pelepasan status nya agar dapat dilakukan konstruksi oleh PT Utama Karya 3. Pembangunan konstruksi akan dilaksanakan pada tahun 2022 masuk pada anggaran pembangunan jalan tol Trase Rengat – Pekanbaru
BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP-1 24 Km	96,8 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 10 desa berada dlm Kawasan Hutan yang dikonversi (HPK) seluas 8 Ha dan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 88, 8 Ha 2. Adanya kebutuhan Lahan Tambahan sesuai RTA, diperlukan PENLOK Tambahan / Revisi PENLOK dan Pelepasan Kawasan Hutan

c. Pemaparan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau

Beberapa kasus pertanahan yang menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau antara lain:

1. Konflik pertanahan antara PT Wanasari dengan masyarakat Desa Simpang Raya, Singingi Hilir, Kuansing terdapat tumpang tindih perizinan seluas 85 hektare lahan milik 60 Kepala Keluarga (KK) yang sudah bersertifikat tapi masuk dalam areal HGU perusahaan.
2. Kasus PT Duta Palma Grup dengan masyarakat yang meminta plasma 20% dari perusahaan tersebut yang sedang berperkara di pengadilan.
3. Mendorong adanya MoU antara PTPN 3 dan PTPN 5 terkait anggaran pemeliharaan dan pengawasan perkebunan, karena banyak sekali kasus penjarahan sawit dengan alat berat.

d. Tanggapan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN

Perkebunan sawit memang menjadi salah satu potensi penerimaan negara (pajak dan bukan pajak) yang cukup tinggi, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim audit di sektor perkebunan kelapa sawit yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan anggota di dalamnya Kementerian ATR/BPN, BPKP, dan lain-lain. Tujuan tim audit ini untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit. Perizinan-perizinan lain dilakukan Dinas Perkebunan atau pemerintah daerah. Dari total tutupan Kawasan hutan, 1.4 juta ha lahan sawit masuk dalam kawasan hutan, sedangkan 2 juta ha lahan sawit berada di luar kawasan hutan. Sementara, masih ada 1 juta ha lahan sawit yang belum kita daftarkan. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap perizinan HGU.

e. Tanggapan Kanwil BPN Provinsi Riau atas pertanyaan anggota Komisi II DPR RI

- 1) Terkait PT TUM Kanwil BPN Provinsi Riau sudah melakukan penertiban terhadap tanah terindikasi terlantar. Surat usulan dari Kanwil BPN Provinsi Riau ke Kementerian ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar dikirimkan pada 14 Oktober 2022.
- 2) Pada proses pembuatan jalan tol Pekanbaru-Dumai banyak masyarakat yang tidak dapat menunjukkan bukti otentik kepemilikan tanah. Oleh karena itu Kanwil BPN Provinsi Riau sudah menyiapkan scan sertifikat atau bukti kepemilikan tanah sebanyak 2.681 sertifikat. Kanwil BPN Provinsi Riau memiliki layanan pengecekan sertifikat tanah yang ada di setiap kantor pertanahan.
- 3) roses Izin HGU PT. Ekadura tetap dilanjutkan karena semua persyaratan sudah dipenuhi oleh perusahaan, namun tanah seluas 452 Ha ditunda proses perpanjangan HGUnya karena masih ada claim masyarakat Suku Maharajo dan segera diselesaikan baik musyawarah maupun gugatan perdata. Agar ada kepastian hukum sebaiknya permasalahan ini dilanjutkan ke jalur hukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi Riau segera melakukan evaluasi dan pengukuran ulang lahan perusahaan yang terindikasi melebihi izin HGU yang dimilikinya agar kelebihan lahan perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) sekitar, seluas 20% sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
2. Terhadap 84 perusahaan yang belum memiliki HGU di Provinsi Riau, Komisi II DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi Riau segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan melibatkan aparat penegak hukum karena terdapat dugaan pelanggaran ini berpotensi merugikan keuangan negara.

3. Komisi II DPR RI mendorong Kanwil BPN Provinsi Riau meningkatkan penyerapan anggaran untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sudah ditetapkan mengingat realisasi anggaran masih sebesar 62.81% memasuki akhir tahun 2022.
4. Terkait konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Ekadura dengan masyarakat Suku Maharjo terhadap klaim tanah seluas 452 ha, Komisi II DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi Riau segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangannya serta menetapkan batas waktu penyelesaian.
5. Dalam rangka mendapatkan hasil lidik yang berkualitas dan mencegah pelaku mafia tanah dapat terbebas dari jerat hukum, Komisi II DPR RI meminta kepada aparat penegak hukum untuk melibatkan BPN ketika melakukan penyelidikan misalnya sebagai saksi ahli dalam bidang pertanahan.
6. Sebagai upaya memastikan ASN menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Komisi II DPR RI mendukung Kanwil BPN Provinsi Riau untuk menyusun regulasi tentang perlunya izin dari Menteri ATR/BPN bagi ASN yang akan dipanggil oleh aparat penegak hukum.
7. Terdapat inkonsistensi data dalam paparan yang disampaikan oleh Kanwil BPN Provinsi Riau. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI meminta jawaban tertulis dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota Komisi II DPR RI dengan data yang akurat dan lengkap.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Riau pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 2022, semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2022

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH